

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, bentuk pemerintahan Indonesia didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas kepada rakyatnya (Agung et al., 2024). Dalam hal ini, seluruh warga negara memiliki hak yang setara dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi atau dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi di Indonesia memungkinkan bagi setiap warganya terlibat dalam perumusan, pengembangan, dan pembentukan hukum baik secara langsung maupun melalui perwakilan (Nendissa, 2018). Perwujudan sistem demokrasi Indonesia salah satunya melalui lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Lembaga negara yang memiliki tiga fungsi untuk melakukan pengawasan, legislasi, dan anggaran ini beranggotakan individu yang berasal dari partai politik (Arrifqi et al., 2023).

Dikutip dari (DPR RI, n.d.), DPR RI memiliki tiga hak untuk melaksanakan tanggung jawabnya sebagai perwakilan rakyat dalam sistem demokrasi di Indonesia, yaitu hak Interpelasi yang merupakan hak untuk meminta keterangan kepada pemerintah sebagai pelaksana kebijakan dalam sistem tata negara yang mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; hak angket yaitu hak untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan undang-undang dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; hak menyatakan pendapat yaitu tindak lanjut dari pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket. Seorang anggota dewan harus dipilih oleh rakyat pada Pemilihan Umum untuk dapat mewakili suara rakyat di daerah pilihnya masing-masing. Dalam hal ini, rakyat memiliki peran penting sebagai pemilih untuk memastikan bahwa calon anggota dewan yang dipilih mampu menyampaikan dan mengakomodasi aspirasi yang ada di daerahnya (Dewi & Darmaastawan, 2024).

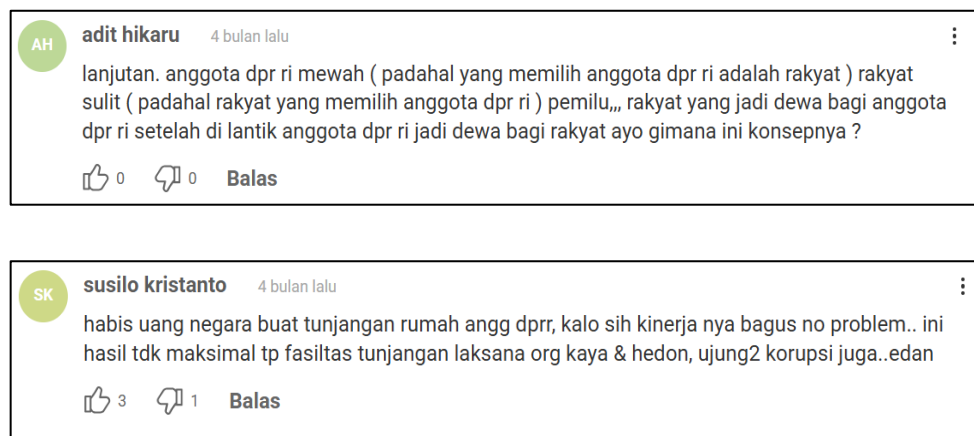
Literasi kebijakan memainkan peran penting dalam partisipasi politik masyarakat. Masyarakat dengan literasi kebijakan yang rendah cenderung memiliki pengetahuan dan pemahaman yang terbatas tentang kebijakan publik, sehingga partisipasi politik masyarakat juga rendah (Farikiansyah et al., n.d.). Sebaliknya, masyarakat dengan literasi kebijakan tinggi memiliki pemahaman yang lebih baik tentang dampak kebijakan, sehingga mereka lebih termotivasi untuk berpartisipasi aktif dalam mempengaruhi kebijakan yang dapat merugikan kepentingan mereka (Suropati, 2023). Kenyataannya, masih terdapat masyarakat yang belum memahami peran dan fungsi DPR RI secara optimal. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada tahun 2020, hanya 34,1% responden yang menyatakan memahami peran DPR RI dengan baik (LSI, 2020). Sementara itu, 41,5% responden menyatakan tidak memahami peran DPR RI sama sekali (LSI, 2020). Tingkat pemahaman masyarakat yang rendah terhadap peran DPR RI dapat menyebabkan beberapa dampak negatif, seperti rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi, kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan, serta melemahnya kontrol sosial terhadap pemerintah (Scheidig & Obergassel, 2024). Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang peran DPR RI.

Terlebih, indeks kepercayaan masyarakat terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menurut hasil survei Litbang Kompas pada 27 Mei hingga 2 Juni 2024 adalah sebesar 62,6% (Parlementaria, 2024). Survei tersebut mencatat bahwa DPR RI berada pada urutan ketiga terbawah di antara lembaga lain. Dalam tiga tahun terakhir, fungsi DPR RI sebagai lembaga legislatif tidak pernah menyentuh angka 80% dalam hal kepercayaan masyarakat. Survei ini mempunyai Tingkat kepercayaan 95% dengan *margin of error* kurang lebih 3,10% dalam kondisi penarikan sampel acak. Survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas menggunakan metode wawancara langsung kepada 1000 responden yang dipilih secara acak dan melalui metode pencuplikan bertingkat di 38 provinsi yang tersebar di Indonesia (Wiryono & Belarminus, 2025).

Pandangan negatif publik terhadap DPR RI juga terlihat pada komentar-komentar mereka di artikel dan media sosial. Komentar yang cenderung negatif dilayangkan atas nama lembaga, bukan perseorangan anggota DPR RI membuat citra lembaga ini dinilai buruk.



Gambar 1.1 Artikel Kompas.com tentang Rumah Jabatan Anggota DPR RI



Gambar 1.2 Tanggapan Masyarakat atas Artikel Kompas.com tentang Rumah jabatan Anggota DPR RI

Artikel yang diunggah Kompas.com pada tanggal 5 Oktober 2024 tersebut menuai 48 komentar negatif masyarakat yang menganggap bahwa semua anggota DPR RI mendapatkan fasilitas mewah yang tidak sesuai dengan kinerjanya. Masyarakat menilai bahwa DPR RI sebagai lembaga legislatif yang mewakili aspirasi dan hak rakyat kepada pemerintah tidak menjalankan porsi sebagaimana mestinya dan tidak layak diberi fasilitas yang mewah. Komentar lain menganggap bahwa rencana penggantian RJA atau Rumah Jabatan Anggota ke uang tunjangan akan memiliki potensi korupsi yang jauh lebih besar. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh (Duei Putri et al., 2022) tentang

analisis sentimen masyarakat mengenai DPR RI menunjukkan bahwa 758 dari 1546 cuitan di aplikasi Twitter (sekarang X) adalah komentar negatif. Artinya, 49% masyarakat Indonesia memberikan komentar negatif terhadap DPR RI.



Gambar 1.3 Cuitan Akun @kotakmakan di X mengenai DPR RI

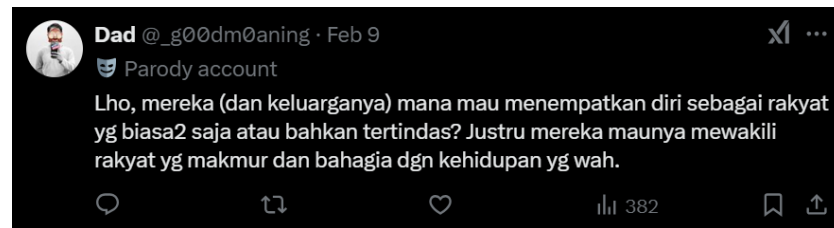
Gambar 1.3 merupakan salah satu unggahan pada tanggal 8 Februari 2025 yang sudah dilihat oleh lebih dari 34 ribu kali. Cuitan berisi opini pribadi pengirim ini memperoleh dua puluh tanggapan dan diposting ulang sebanyak 291 akun. Komentar yang dilayangkan pun beragam. Terdapat masyarakat yang setuju akan pendapat ini dan tentu ada yang menganggap pendapat ini tidak dapat diterapkan oleh anggota DPR.



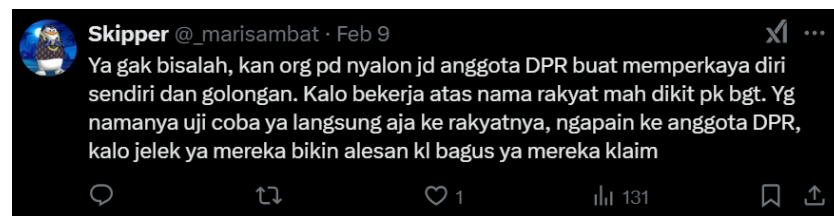
Gambar 1.4 Tanggapan akun @baihaki\_ahmad terhadap Cuitan @kotakmakan

Salah satu tanggapan dari cuitan tersebut menunjukkan ketidakpercayaan rakyat apabila opini ini diindahkan oleh DPR RI dalam menyusun kebijakan. Tanggapan lainnya datang dari akun @\_goodmoaning yang terkesan

menyamarkan semua anggota DPR tidak dapat menempatkan dirinya sebagai rakyat atau yang mewakili rakyat.



Gambar 1.5 Tanggapan akun @\_goodmoaning terhadap Cuitan @kotakmakan



Gambar 1. 6 Tanggapan akun @\_marisambat terhadap Cuitan @kotakmakan

Beberapa cuitan dan tanggapan masyarakat terhadap DPR RI secara individu maupun lembaga, tentu memengaruhi pandangan mereka dan bagaimana masyarakat memaknai DPR RI sebagai perwakilan rakyat kepada pemerintah. DPR RI secara lembaga memiliki peran penting untuk menjaga stabilitas demokrasi di Indonesia karena perannya sebagai lembaga legislatif. Sebagai perwakilan rakyat kepada pemerintah, tentu DPR RI memerlukan peran konstituennya, yaitu masyarakat Indonesia untuk menyerap seluruh aspirasi dan mengakomodasi kepentingan-kepentingan rakyat. Kepercayaan terhadap parlemen diperlukan untuk mendorong partisipasi rakyat dalam sistem demokrasi Indonesia.

Kesadaran dan kepedulian terhadap sistem demokrasi Indonesia merupakan faktor utama dalam keterlibatan aktif rakyat (Farikiansyah et al., n.d.). Tingkat pengetahuan dan kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara menjadi tolok ukur seorang individu memutuskan untuk terlibat secara aktif dalam proses demokrasi Indonesia (Dewi & Darmaastawan, 2024). Penelitian yang dilakukan oleh Ni Kadek Shinta Dewi menjelaskan bahwa terdapat

perbedaan antara perilaku dan keputusan individu dalam mengikuti pemilihan umum 2024 (Dewi & Darmaastawan, 2024). Pemilih yang belum terpapar informasi mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara khususnya saat masa pemilu cenderung tidak peduli terhadap dunia politik dan bimbang akan pilihannya yang tentu saja dapat memengaruhi partisipasi mereka dalam pemilu. Sedangkan pemilih yang terintervensi menggunakan media cetak berupa brosur membuat masyarakat Desa Dauh Puri Kauh semakin memahami pentingnya partisipasi dan suara mereka dalam keberlangsungan negara. Hal ini menunjukkan bahwa edukasi dengan media dan strategi komunikasi yang tepat mampu memengaruhi partisipasi publik terhadap proses demokrasi Indonesia.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Agung et al., 2024) dihasilkan bahwa masyarakat menilai citra DPR RI sangat buruk, hal ini didukung dengan survei yang dilakukan pada bulan Juli 2021 terhadap kinerja DPR RI periode 2019-2024 yang hasilnya adalah hanya 15,1% masyarakat yang puas dengan kinerja DPR RI. Penelitian yang dilakukan oleh (Arrifqi et al., 2023) menganalisis sentimen cuitan masyarakat yang mengandung kata kunci DPR RI di aplikasi twitter (sekarang X) menghasilkan 75,06% cuitan masyarakat adalah sentimen negatif dengan kemunculan kata “marah” adalah yang terbanyak. DPR RI sebagai lembaga legislatif memiliki peran sentral yang membutuhkan kepercayaan publik terhadap keberjalanannya (Oktaviani, 2022). Kepercayaan publik dipengaruhi oleh integritas suatu lembaga dan individu yang terlibat di dalamnya. Salah satu konsep kepercayaan publik adalah *political trust* (Scheidig & Obergassel, 2024) dimana untuk mewujudkan pemerintahan yang berkelanjutan, diperlukan transparansi dan akuntabilitas lembaga. (Rahayu dan Juwono, 2019) menyatakan bahwa perlunya membangun hubungan dengan publik untuk mendapatkan kepercayaan dan menjalankan fungsi lembaga dengan efektif. Dalam hal ini, DPR RI sebagai lembaga legislatif dapat menyelenggarakan pelayanan publik dan meningkatkannya untuk mendapatkan lebih banyak kepercayaan masyarakat.

Survei pada tanggal 4-5 Maret 2025 untuk mengetahui pengetahuan masyarakat tentang DPR RI beserta fungsinya dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada total 50 responden yang terdiri dari 72% Mahasiswa D3/D4/S, 12% siswa SD/ sederajat, 10% siswa SMP/SMA/ sederajat, dan 6% masyarakat umum. Kuesioner berisi pertanyaan mengenai tugas dan fungsi DPR RI, Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPR RI, dan keanggotaan DPR RI. Hasilnya, diperoleh sebanyak 26% responden masih keliru memilih tiga fungsi DPR RI, 44% responden belum mengetahui jumlah komisi di DPR RI, 66% responden masih belum mengetahui apa itu Alat Kelengkapan Dewan (AKD) beserta nomenklaturanya, 50% responden tidak mengetahui jenis rapat selain Rapat Paripurna, 56% responden tidak mengetahui bagaimana undang-undang terbentuk. Dalam menjawab pertanyaan yang menyajikan pernyataan mengenai DPR RI, mayoritas responden memiliki perspektif yang keliru, seperti 80% responden menjawab “benar” pada pernyataan “DPR RI adalah lembaga pemerintah”, 58% responden menjawab “benar” pada pernyataan “DPR RI memiliki 1 pimpinan”. Contoh lainnya adalah sebanyak 78% responden beranggapan bahwa semua individu yang menjadi anggota partai dapat menjadi anggota DPR RI apabila dipilih oleh rakyat. Selain itu, didapati bahwa 40% responden belum mengetahui kehadiran program Edukasi Parlemen dan 80% responden belum pernah menemukan *E-book* yang berisi informasi mengenai Parlemen DPR RI.

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, mengikat setiap lembaga pemerintah untuk melakukan serangkaian kegiatan pemenuhan kebutuhan masyarakat baik layanan barang, jasa, maupun layanan administratif. DPR RI sebagai lembaga yang penyelenggaraannya didanai oleh APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) wajib melakukan pelayanan publik dengan cepat, efektif, dan efisien. Dinamika yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, membuat lembaga ini harus beradaptasi dengan perubahan zaman dan kebutuhan informasi serta layanan yang diberikan kepada rakyatnya. Dalam menghadapi situasi yang dinamis dan mendorong efektivitas pelayanan publik, DPR RI membentuk sistem pendukung yang

bersifat substantif untuk menyelenggarakan kebutuhan persidangan, keahlian, dan administrasi di lingkungan DPR RI. Unsur *supporting system* yang berkedudukan sebagai Kesekretariatan Lembaga Negara ini bertanggung jawab langsung dengan Pimpinan DPR RI.

Sesuai dengan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal DPR RI, Bagian Humas dan Pengelolaan Museum memiliki tugas untuk melaksanakan pelayanan informasi publik, kunjungan masyarakat, dan penyaluran delegasi masyarakat, serta melaksanakan promosi, diseminasi, dan edukasi publik sekaligus mengelola museum di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI. Salah satu upaya DPR RI dalam mengedukasi masyarakat Indonesia tentang tugas dan fungsi DPR RI secara mendalam adalah melalui program Kunjungan Edukasi Parlemen yang dikelola oleh Bagian Humas dan Pengelolaan Museum Sekretariat Jenderal DPR RI. Kunjungan Edukasi Parlemen memiliki tujuan untuk mewadahi masyarakat Indonesia yang ingin mengetahui lebih dalam tentang tugas dan fungsi DPR RI yang dilaksanakan di Kompleks DPR RI. Dalam pelaksanaannya, masyarakat yang berkunjung akan diajak untuk mengunjungi Gedung Nusantara I dan Museum DPR RI sekaligus mendapatkan penjelasan mengenai Sejarah DPR RI dari masa ke masa. Selanjutnya, masyarakat akan difasilitasi untuk mendapatkan penjelasan mendalam mengenai tugas dan fungsi DPR, proses pembentukan undang-undang, hingga melakukan *roleplay* anggota dewan saat melakukan rapat kerja. Pemaparan materi akan dilakukan oleh seorang Pranata Humas Ahli, Anggota Dewan, atau Eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI selama kurang lebih dua jam di dalam ruang diskusi.

Kunjungan Edukasi Parlemen dilakukan dengan metode ceramah dan diskusi singkat. Peserta kunjungan diperbolehkan mengajukan pertanyaan seputar DPR RI dari materi yang sudah disampaikan atau di luar materi. Setelah melakukan kunjungan, masyarakat dapat mengakses media sosial yang dikelola oleh Bagian Humas dan Pengelolaan Museum untuk mengetahui lebih banyak

tentang DPR RI. Metode ceramah atau penjelasan secara lisan merupakan proses penyampaian informasi secara tradisional yang memiliki celah seperti perasaan bosan atau jenuh (Susilawati & Rusdinal, 2022). Diperlukan media belajar penunjang untuk meningkatkan pemahaman peserta kunjungan terhadap peran DPR RI sehingga mereka dapat mengakses informasi mendalam seputar Parlemen DPR RI dimana saja dan kapan saja. Media pembelajaran yang memanfaatkan teknologi dapat menjadi alternatif, salah satunya adalah penggunaan *E-book* atau buku digital yang memungkinkan untuk memuat informasi mendalam mengenai Parlemen DPR RI. Penggunaan *E-book* memungkinkan peserta kunjungan meninjau ulang materi yang disampaikan oleh edukator setelah berkunjung ke Kompleks Parlemen DPR RI. *E-book* memuat berbagai fitur seperti *hyperlink*, video, ilustrasi gambar, dan audio yang dapat dimanfaatkan oleh peserta kunjungan untuk mengakses lebih banyak informasi mengenai DPR RI. Akses yang mudah juga merupakan salah satu keunggulan *E-book* sebagai media pembelajaran karena dapat diakses melalui *smartphone*, laptop, tablet, dan komputer.

DPR RI memiliki website yang menghimpun karya-karya anggota dewan dan 28 buku digital yang ditulis oleh tim dari fraksi-fraksi yang ada. Buku-buku digital yang dimuat dalam website e-media DPR RI pada tautan [emedia.dpr.go.id](http://emedia.dpr.go.id) merupakan jenis buku auto-biografi anggota dewan, pimpinan, dan Selayang pandang DPR RI hingga fraksi-fraksi yang ada di DPR RI. Dilihat dari jenisnya, buku tersebut memiliki target audien usia dewasa yang ingin mengetahui pencapaian anggota dewan, pimpinan, dan fraksi di DPR RI. Website tersebut tidak memuat buku mengenai edukasi parlemen yang fokusnya pada peran DPR RI sebagai lembaga legislatif yang ditujukan pada anak-anak usia sekolah. Hal ini sangat disayangkan mengingat program Kunjungan Edukasi Parlemen memiliki peserta kunjungan yang didominasi oleh anak-anak usia sekolah yang dapat diberikan edukasi politik sejak dini. Melalui *e-book* yang memuat informasi mengenai peran DPR RI secara menyeluruh dengan

memanfaatkan multimedia dan visual yang cocok untuk anak-anak, dapat mengoptimalkan tujuan edukasi politik demokrasi kepada anak-anak.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Pemahaman masyarakat yang rendah terhadap tugas dan fungsi DPR RI menurunkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat terhadap DPR RI. Sebagai upaya meningkatkan kepercayaan publik melalui peningkatan pelayanan publik, Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai *supporting system* anggota DPR RI dalam menjalankan tugas dan fungsinya menginisiasi program Edukasi Parlemen di bawah kelola Bagian Humas dan Pengelolaan Museum untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap lembaga legislatif DPR RI. Pelaksanaan Kunjungan Edukasi Parlemen belum memiliki media belajar yang dapat digunakan masyarakat setelah melakukan kunjungan. Sehingga dengan produksi media belajar digital ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang lembaga legislatif DPR RI.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Umum**

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk menghasilkan produk berupa media pembelajaran digital yang dapat digunakan oleh tamu Kunjungan Edukasi Parlemen sebagai bentuk efektivitas pembelajaran terhadap tugas dan fungsi DPR RI sehingga dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap peran parlemen DPR RI.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoretis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pandangan baru terhadap efektivitas pelayanan publik yang dalam hal ini adalah pelayanan jasa publik. Diharapkan terdapat pengembangan ilmu, metode, atau media lain untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran parlemen dari hasil produksi karya ini.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Secara praktis, diharapkan penelitian ini mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan pelaksanaan layanan Kunjungan Edukasi Parlemen.

#### **1.4.3 Manfaat Sosial**

Produk dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang cukup bagi masyarakat terhadap tugas dan fungsi DPR RI serta pentingnya partisipasi masyarakat dalam keberlangsungan demokrasi di Indonesia.

#### **1.5 Luaran**

Luaran dari penelitian ini adalah produksi media *public relations* berupa buku elektronik yang dapat diakses melalui *smartphone* dan dapat diunduh serta digunakan berulang kali. Selain itu, produk HKI (Hak Kekayaan Intelektual) berupa buku elektronik berjudul “Tahukah Kamu? Edisi Trivia Parlemen DPR RI”